



SINERGI PEMBERANTASAN PUNGLI

Pendahuluan

Pungutan liar (pungli) rasanya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pungli sudah muncul seiring perjalanan sejarah bangsa. Era kolonialisme bisa dikatakan sebagai lahan subur merebaknya pungli. Pihak penjajah tidak segan-segan menarik pajak atau pungutan yang tidak berdasar aturan yang berkeadilan bagi masyarakat waktu itu.

Memasuki zaman modern saat ini, kebiasaan pungli tumbuh dalam beragam kedok untuk menutupi keberadaannya. Uang sukarela kala berurusan dengan aparat pemerintah sudah biasa dijumpai di sejumlah pusat pelayanan publik. Uang balas jasa tanda ucapan terima kasih ketika mengurus sesuatu juga menjadi benih hidupnya pungli. Tentunya masih banyak bentuk pungli lain dengan beragam kedok yang sulit terendus pihak berwajib.

Fenomena Masalah Pungli

Pungli dalam praktiknya bersinonim dengan istilah lain seperti uang pelicin, uang rokok, atau uang keamanan, atau istilah lainnya. Merujuk pada kasus-kasus pungli yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, istilah pungli dalam literatur bisa disebut sebagai *illegal charges*, *illegal payments*, *illegal fees*, *informal payments*, *unofficial payments*, *grease money*, *grease payments*, dan sejenisnya.

Ada baiknya coba kita simak laporan kasus-kasus pungli di Indonesia yang diadukan oleh masyarakat dan telah dipublikasikan oleh satuan tugas sapu bersih pungli (Satgas Saber Pungli) berikut ini (www.saberpungli.id). Satgas dalam laporannya selama periode 28 Oktober 2016 sampai 31 Maret 2019 telah berhasil menerima 36.880 laporan/aduan pungli dari masyarakat. Sejumlah laporan/aduan masyarakat tersebut yang akhirnya dapat ditindaklanjuti menjadi kasus ada sekitar 12.500-an laporan, sedangkan aduan lainnya tidak dapat ditindaklanjuti menjadi kasus.

Berbagai laporan/aduan pungli dari masyarakat tersebut dilaporkan melalui SMS



Florentinus Nugro Hardianto
Dosen Program Studi Ekonomi,
FE-USD
flnugroho@gmail.com

(SMS 1193) sebanyak 23.532 laporan, *email* (lapor@saberpungli.id) sebanyak 6.648 laporan, aplikasi *web* (saberpungli.id) sebanyak 3.001 laporan, *call center* 193 sebanyak 2.370 laporan, melalui surat sebanyak 1.073 laporan, dan pengaduan secara langsung sebanyak 256 laporan.

Dari laporan pengaduan tersebut, masalah yang paling banyak dilaporkan yaitu terkait masalah pelayanan masyarakat (52%), pendidikan (20%), hukum (8%), perizinan (5%), kepegawaian (5%), pengadaan barang dan jasa (5%), dan lain-lain (5%).

Instansi dan daerah yang paling banyak mendapat aduan pungli dari masyarakat juga tercatat oleh Satgas Saber Pungli. Instansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kemendagri, Kemendikbud, Polri, Kemenhub, dan Kementerian ATR & BPN. Untuk daerah yang banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten dan Sumatera Utara.

Penyebab Pungli

Fenomena masalah pungli dan perkembangannya yang terjadi di Indonesia mustahil muncul begitu saja. Pasti ada faktor penyebabnya! Berdasarkan penelusuran sejumlah literatur yang berhasil diakses, ada cukup banyak pendapat atau pandangan yang mencoba menjelaskan faktor penyebab terjadinya pungli. Pungli bisa disebabkan oleh faktor budaya yang mana pungli sudah dianggap menjadi kebiasaan dan umum terjadi di masyarakat. Masyarakat

sudah menganggap pungli itu aktivitas transaksi biasa untuk memperlancar atau membesarkan suatu urusan.

Pungli juga bisa muncul karena faktor regulasi dan penegakan hukum. Regulasi yang ada kadang tidak jelas mengatur proses interaksi dan transaksi dalam pelayanan publik. Ketidakjelasan regulasi tersebut kemudian dimanfaatkan oknum pihak-pihak terkait untuk melancarkan aksi pungli. Kemudian faktor penegakan hukum yang dimaksud adalah kekurangan dan ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam memberi sanksi atau hukuman kepada para pelaku pungli. Lebih-lebih, pungli ini hanya dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan saja (*petty corruption*) sehingga banyak pihak yang menganggapnya tidak terlalu signifikan menghasilkan dampak negatif.

Faktor-faktor penyebab itulah yang nampaknya menjadi angin segar bagi pelaku pungli dalam menjalankan aksinya sehingga semakin lama semakin meluas peredaran kasus-kasus pungli di tengah masyarakat dan semakin menyebar dampak negatif yang ditimbulkannya.

Sinergi TSM

Berangkat dari kegagalan demi kegagalan pemberantasan pungli yang telah dilakukan selama ini, model sinergi TSM (Terstruktur, Sistemik, dan Masif) diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang lebih efektif. Model sinergi TSM ini menjelaskan bahwa pemberantasan pungli itu hendaknya mengandung tiga karakteristik, yakni terstruktur, sistemik, dan masif.

Terstruktur mensyaratkan pemberantasan pungli yang mencakup berbagai tingkat struktur dalam setiap organisasi atau lembaga yang mengikutsertakan jajaran pimpinan hingga tingkat terbawah. Sistemik menghendaki pemberantasan pungli yang mengaktifkan partisipasi seluruh anggota *stakeholders* yang terkait tidak hanya pihak penegak hukum beserta satuan tugas (satgas) punglinya tetapi semua pihak yang pe-

duli terhadap pemberantasan pungli. Masif menunjuk pada pemberantasan pungli yang menjangkau berbagai sektor, penjurur-penjuru wilayah/daerah, dan beragam aktivitas masyarakat.

Ketiga karakteristik di atas saling berkaitan sehingga satu dengan lainnya tidak bisa dipisahkan. Tidak ada prioritas di antara ketiga karakteristik itu. Integrasi ketiga karakteristik itulah yang menjadi prioritas utamanya sehingga semuanya berjalan beriringan. Dengan pemberantasan pungli secara terstruktur, sistemik, dan masif diharapkan bisa lebih efektif menghilangkan atau setidaknya mengurangi faktor penyebab budaya, faktor regulasi, faktor penegakan hukum, atau faktor penyebab lain munculnya pungli.

Penutup

Dalam praktiknya, model sinergi TSM di atas perlu dilakukan melalui sosialisasi konseptual, gerakan operasional, dan evaluasi perbaikan. Sosialisasi konseptual dilakukan dengan cara pengenalan sinergi TSM kepada masyarakat luas melalui program edukasi, olahraga, hiburan, seni-budaya, dan program lain yang menjangkau seluruh lapisan sosial. Gerakan operasional dilakukan dengan cara pelaporan, penyidikan, dan proses peradilan tindak pidana pungli secara terbuka kepada masyarakat. Evaluasi perbaikan mengarah kepada evaluasi efektivitas berbagai upaya pemberantasan pungli yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga diketahui dengan tepat titik-titik kelemahan yang masih terjadi untuk langsung secepatnya diambil tindakan perbaikannya.

Dengan demikian, model sinergi TSM dapat membangkitkan rasa optimistik dalam melakukan pemberantasan pungli yang selama ini terjadi (pungli konvensional) dan juga berhasil mencegah modus-modus baru pungli hasil rekayasa atau manipulasi lebih canggih yang belum pernah ada (pungli modern) untuk saat ini maupun di masa-masa mendatang.